



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

---

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.2536/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK)

ANTARA

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WANA LESTARI DENGAN BALAI KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) MARIA DONGGOMASA SELUAS ± 320 (TIGA RATUS  
DUA PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA  
JIA, KECAMATAN SAPE, KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa dilaksanakan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Kemitraan Kehutanan telah disampaikan oleh KTH Wana Lestari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 01/KTH.WL/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- c. bahwa telah dilaksanakan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa dengan KTH Wana Lestari Nomor: 522/315/BKPHMDM/2018 dan Nomor: 05/KTH.WL/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lapangan Nomor: BA.7924/X-2/BPSKL-2/11/2018 tanggal 1 November 2018, luas areal kerja Kemitraan yang direkomendasikan ±320 (tiga ratus dua puluh) hektare untuk 208 (dua ratus delapan) Kepala Keluarga di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. bahwa berdasarkan Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 pasal 44 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KTH Wana Lestari dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa seluas 320 (tiga ratus dua puluh) hektare pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 208 (dua ratus delapan) Kepala Keluarga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Jo. Perdirjen PSKL Nomor: P.9/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Dirjen PSKL Nomor: P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016.

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WANA LESTARI DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) MARIA DONGGOMASA SELUAS ± 320 (TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA JIA, KECAMATAN SAPE, KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KTH Wana Lestari dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa, seluas 320 (tiga ratus dua puluh) hektare pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana peta terlampir dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.

KEDUA : a. Luas areal definitif setelah dilakukan penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak.  
b. Luasan areal garapan disesuaikan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak berdasarkan musyawarah mufakat, dengan luas maksimal 2 Ha/ Kepala Keluarga.

KETIGA : a. Daftar nama anggota KTH Wana Lestari di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.  
b. Luasan garapan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan.

KEEMPAT : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU antara lain:  
1. Usaha pemanfaatan kawasan;  
2. Usaha pemanfaatan Agroforestry;  
3. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); dan  
4. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan.

KELIMA...

- KELIMA** : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Amar Kesatu dengan ketentuan:
1. Tidak boleh diubah fungsi;
  2. Tidak boleh dijual belikan;
  3. Tidak boleh diagunkan; dan
  4. Tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan
- KEENAM** : Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan Kelompok untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.
- KETUJUH** : Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:
1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
  2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
  3. Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
  4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
  5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.
- KEDELAPAN** : Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan wajib:
1. Mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
  2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
  3. Memberi penandaan batas areal Kemitraan Kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak;

4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal Kemitraan Kehutanan;
5. Mempertahankan fungsi hutan;
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan; dan
7. Membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN** : Proporsi bagi hasil :

1. Bagi hasil dari nilai perolehan bersih, setelah menyetor kewajiban ke negara;
2. Untuk Hasil Hutan Bukan Kayu, KTH Wana Lestari mendapatkan 90% (sembilan puluh perseratus) dan BKPH Maria Donggomasa mendapatkan 10% (sepuluh perseratus);
3. Untuk jasa lingkungan, KTH Wana Lestari mendapatkan 80% (delapan puluh perseratus) dan BKPH Maria Donggomasa mendapatkan 20% (dua puluh perseratus); dan
4. Bagi hasil untuk BKPH Maria Donggomasa diterima dan disetorkan ke Kas Daerah setelah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengatur tentang proporsi bagi hasil, tatacara penyetoran, penerimaan, dan penggunaan dana dari bagi hasil Kemitraan Kehutanan.

**KESEPULUH** : Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, KTH Wana Lestari mendapat pembinaan/ pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima.

**KESEBELAS** : Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk itu NKK yang disepakati agar di adenddum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK ini.

**KEDUA BELAS...**

- KEDUA BELAS : Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KETIGA BELAS : Dalam hal Pemanfaatan Hutan dilarang Melakukan Aktifitas Pembukaan Lahan dan Pembakaran Lahan serta mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan ini dapat dicabut sesuai ketentuan perundangan.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekertariat Direktorat  
Jenderal Perhutanan Sosial  
Dan Kemitraan Lingkungan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 1 APRIL 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN DAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001



Enik Eko Wati, S.Si., M.E., M.S.E.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengeloan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14. Bupati Bima;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
17. Camat Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Kepala Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WANA LESTARI DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) MARIA DONGGOMASA SELUAS ± 320 (TIGA RATUS DUA PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA JIA, KECAMATAN SAPE, KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : SK.2536/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA KTH WANA LESTARI DESA JIA, KECAMATAN SAPE, KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama	NIK	Alamat
1	Tasrif	5206060507731007	RT 02/01 DESA JIA
2	Mas'ud	5206061110670002	RT 09/05 DESA JIA
3	Rukmini	5206065107930003	RT 02/01 DESA JIA
4	Takwil	5206060302770001	RT 09/05 DESA JIA
5	Nifsu	5206062704871002	RT 06/03 DESA JIA
6	H.Sudirman	5206060508630001	RT 09/05 DESA JIA
7	Siti Rum	5206065708721005	RT 06/03 DESA JIA
8	Saihudin	5206060107641217	RT 07/04 DESA JIA
9	Faisal	5206060507820004	RT 09/05 DESA JIA
10	Mustamin	5206060107791336	RT 09/05 DESA JIA
11	Adi Mawar	5206060209780002	RT 11/08 DESA JIA
12	Sahlan	5206060107800355	RT 09/05 DESA JIA
13	Ibrahim	5206060107581288	RT 08/04 DESA JIA
14	Sudirman	5206060406771003	RT 18/09 DESA JIA
15	Muh.Said	5206060107601599	RT 01/04 DESA JIA
16	Sudirman	5206060107861380	RT 06/03 DESA JIA
17	Arsyad	5206060107721396	RT 06/03 DESA JIA
18	Jairi	5206060107631213	RT 06/03 DESA JIA
19	Dimi Listri	5206060107501401	RT 02/01 DESA JIA
20	Yasin	5206060107581289	RT 06/03 DESA JIA
21	Arifudin	5206060812700003	RT 07/04 DESA JIA
22	Mustafa	5206060107681231	RT 07/04 DESA JIA
23	Ismail	5206060107571497	RT 08/04 DESA JIA
24	Lukman	5206060107701465	RT 09/05 DESA JIA
25	M.Sidik	5206060107601456	RT 06/03 DESA JIA
26	Muhdar	5206060106871003	RT 09/04 DESA JIA
27	Sumardin	5206060207821002	RT 09/05 DESA JIA
28	M.Saleh Abdollah	5206060107590031	RT 07/04 DESA JIA
29	Yasin	5206060208760002	RT 09/05 DESA JIA
30	Ismail	5206060107851459	RT 04/02 DESA JIA
31	Arhan	5206060107751387	RT 08/04 DESA JIA
32	Rusdin	5206060107751339	RT 02/01 DESA JIA
33	Ahmad	5206060107571294	RT 12/06 DESA JIA
34	Arifin	5206061402840003	RT 01/01 DESA JIA
35	Masran	5206060107611086	RT 09/04 DESA JIA

36	Ahmad	5206060107621338	RT 02/01 DESA JIA
37	Syarifuddin	5206060107621357	RT 12/05 DESA JIA
38	Abdul Halik	5206060107591348	RT 12/06 DESA JIA
39	Suharman	5206060103940001	RT 12/06 DESA JIA
40	Farliansyah	5206061303921005	RT 11/06 DESA JIA
41	Arsyad	5206060107451121	RT 12/05 DESA JIA
42	Arsyad	5206060107641322	RT 09/05 DESA JIA
43	Jaharudin	5206061605810001	RT 11/05 DESA JIA
44	Ahmad	5206061704641003	RT 05/03 DESA JIA
45	Romiansyah	5206060509931004	RT 05/03 DESA JIA
46	Mukhtar	5206060503670001	RT 05/03 DESA JIA
47	Ruslan	5206060107531272	RT 13/06 DESA JIA
48	Syafruddin	5206060107611145	RT 04/02 DESA JIA
49	Darton	5206060306860003	RT 09/04 DESA JIA
50	H.Yasin	5206060107460048	RT 09/05 DESA JIA
51	Rustam	5206060104760001	RT 09/05 DESA JIA
52	Faisal	5206060507820004	RT 09/05 DESA JIA
53	Abubakar	5206060107641331	RT 01/01 DESA JIA
54	Syafii	5206060107901622	RT 03/02 DESA JIA
55	Syahrudin	5206060107621437	RT 09/05 DESA JIA
56	Supardin	5206062807720001	RT 16/08 DESA JIA
57	Kasim	5206060612740002	RT 03/02 DESA JIA
58	Anhar	5271040306890001	RT 12/02 DESA JIA
59	Sarjan	5206061703820002	RT 08/04 DESA JIA
60	Hanafi	5206060107821504	RT 08/05 DESA JIA
61	Sirajudin	5206060107731305	RT 17/09 DESA JIA
62	Mustamin	5206060107661194	RT 17/09 DESA JIA
63	Suaidin	5206060107781445	RT 17/09 DESA JIA
64	H.Baharuddin	5206060107621366	RT 17/09 DESA JIA
65	Supratmansyah	5206062005931006	RT 17/09 DESA JIA
66	Jaidin	5206061404740002	RT 16/08 DESA JIA
67	Muhammad	5206060107591331	RT 17/08 DESA JIA
68	Ibrahim	5206060107521224	RT 16/08 DESA JIA
69	M.Nur	5206060107501278	RT 15/08 DESA JIA
70	Hairil Anwar	5206060308770001	RT 15/08 DESA JIA
71	Adisan	5206060101820007	RT 16/08 DESA JIA
72	A.Haris	5206060107711200	RT 15/08 DESA JIA
73	Gufran	5206060308881002	RT 15/08 DESA JIA
74	Edi Suwardin	5206061105810002	RT 17/09 DESA JIA
75	Abubakar	5206060107680144	RT 16/08 DESA JIA
76	Suharno	5206060107601479	RT 15/08 DESA JIA
77	Makruf	5206060802851002	RT 14/07 DESA JIA
78	Nasrulah	5206060107571368	RT 17/09 DESA JIA
79	Jamlin	5206060107601623	RT 15/08 DESA JIA
80	Argada	5206060608811005	RT 14/07 DESA JIA
81	Suhardin	5206060508840004	RT 07/04 DESA JIA
82	Burhan	5206060107591300	RT 10/05 DESA JIA
83	Yusrin	5206060401780001	RT 05/03 DESA JIA
84	Hairurrahman	5206061202890003	RT 17/09 DESA JIA
85	Syamsudin	5206061808760002	RT 15/08 DESA JIA

86	Rifaid	5206062610720001	RT 18/09 DESA JIA
87	Imran	5206060107571482	RT 16/08 DESA JIA
88	Ariyaiman	5206060105871003	RT 11/06 DESA JIA
89	Arsyad	5206060107631255	RT 17/08 DESA JIA
90	Safrudin	5206061502721004	RT 16/08 DESA JIA
91	Tamsil	5206061002680001	RT 18/09 DESA JIA
92	Suriati	5206064809880001	RT 17/08 DESA JIA
93	Ridwan	5206061202811004	RT 16/08 DESA JIA
94	Fahrin	5206060107811308	RT 06/03 DESA JIA
95	Ihwan	5206063112661034	RT 16/08 DESA JIA
96	Tamrin	5206060107811229	RT 16/08 DESA JIA
97	Syafrudin	5206061502721004	RT 16/08 DESA JIA
98	A.Hamid	5206060107511106	RT 09/05 DESA JIA
99	Ilham	5206062007760001	RT 14/07 DESA JIA
100	Mahmud	5206060107601379	RT 16/08 DESA JIA
101	Fujiarti	5206065707740002	RT 17/09 DESA JIA
102	Syafrudin	5206060107601379	RT 11/06 DESA JIA
103	Muhammad Sahid	5206060102880007	RT 18/09 DESA JIA
104	Ibrahim	5206060508741002	RT 09/05 DESA JIA
105	Sarbini	5206062011660001	RT 13/07 DESA JIA
106	Nasaruddin	5206063112681025	RT 14/06 DESA JIA
107	Syahrullah	5206060203640001	RT 14/07 DESA JIA
108	Ramlin	5206061804840004	RT 14/06 DESA JIA
109	H.Jufri	5206061003680001	RT 14/07 DESA JIA
110	Abdul Azis	5206060107691265	RT 14/06 DESA JIA
111	Ruslin	5206060107661422	RT 14/07 DESA JIA
112	Jaidun	5206061107860001	RT 14/07 DESA JIA
113	Arifin	5206060107591172	RT 12/05 DESA JIA
114	Afandi	5206062009740002	RT 12/06 DESA JIA
115	Iman Sari	5206061208861004	RT 12/06 DESA JIA
116	Muhammadin	5206060107651356	RT 11/06 DESA JIA
117	Mansyur	5206060107661197	RT 14/07 DESA JIA
118	Sahlan	5206062104961007	RT 11/06 DESA JIA
119	Alfian Aladin	5206060705941007	RT 14/07 DESA JIA
120	Firdaus	5206062901860002	RT 14/07 DESA JIA
121	Nurhaidin	5206060107731384	RT 14/07 DESA JIA
122	Iskandar	5206060107861470	RT 09/04 DESA JIA
123	M.Said	5206060107551374	RT 14/07 DESA JIA
124	Syahbudin	5206060809750001	RT 13/07 DESA JIA
125	Darwis	5206060107771421	RT 13/07 DESA JIA
126	Arsid	5206061006670001	RT 14/07 DESA JIA
127	Idris	5206060107761250	RT 13/07 DESA JIA
128	M.Saleh	5206060512640001	RT 10/05 DESA JIA
129	Muhlis	5272020205820008	RT 01/01 DESA JIA
130	Fahrin	5206060104820004	RT 10/05 DESA JIA
131	Feriman	5206061312790001	RT 10/05 DESA JIA
132	Samsudin	5206061001811003	RT 11/05 DESA JIA
133	Herman	5206062306870002	RT 11/06 DESA JIA
134	Salmin	5206060107681274	RT 13/07 DESA JIA
135	Darsan	5206060107631209	RT 11/06 DESA JIA

136	Hamdan	5206060107641196	RT 11/06 DESA JIA
137	Jainudin	5206060107731280	RT 13/07 DESA JIA
138	Supardin	5206060107711172	RT 12/06 DESA JIA
139	Mukrin	5206062809680004	RT 14/07 DESA JIA
140	Yadin	5206062802901005	RT 12/06 DESA JIA
141	A.Azis	5206060107641248	RT 13/06 DESA JIA
142	A.Hamid	5206060703540001	RT 13/07 DESA JIA
143	Adhar	5206060107791206	RT 11/02 DESA JIA
144	Syafrudin	5206060107561135	RT 11/02 DESA JIA
145	Mukmina	5206064107561259	RT 02/02 DESA JIA
146	Muh.Yasin	5206060107611113	RT 08/04 DESA JIA
147	Hamdan	5206061203800001	RT 12/06 DESA JIA
148	Arsyad	5206060107581280	RT 12/06 DESA JIA
149	Hermanto	5206060107891358	RT 08/04 DESA JIA
150	Nurjanah	5206065407760001	RT 13/07 DESA JIA
151	Saodah	5206064107601426	RT 13/06 DESA JIA
152	Sirajudin	5206060107731305	RT 17/09 DESA JIA
153	Ahmad	5206060107551308	RT 09/03 DESA JIA
154	Imam Fardiansyah	5272041007950001	RT 09/03 DESA JIA
155	Jainul	5206060701841006	RT 11/06 DESA JIA
156	Imran	5206060107571482	RT 16/08 DESA JIA
157	Idris Himi	5206060107600052	RT 11/05 DESA JIA
158	Akhyar	5206061212801005	RT 08/04 DESA JIA
159	Muhammad Yamin	5206063112661024	RT 01/01 DESA JIA
160	Aswad	5206060107501401	RT 02/01 DESA JIA
161	Arifin	5206060107661280	RT 02/01 DESA JIA
162	Herman	5206060607740001	RT 04/02 DESA JIA
163	Saidin	5206060107821589	RT 06/03 DESA JIA
164	Muhtar	5206060107721342	RT 06/03 DESA JIA
165	Abdurrahma	5206060107480069	RT 01/01 DESA JIA
166	Arhan	5206062802720002	RT 01/01 DESA JIA
167	Sukarman	5206062005790001	RT 18/09 DESA JIA
168	Nurdin	5206061205820001	RT 02/01 DESA JIA
169	Yasin	5206060107741232	RT 02/01 DESA JIA
170	Hanafi	5206060107721342	RT 00/03 DESA JIA
171	Ambrin	5206062803841003	RT 02/01 DESA JIA
172	Gufnan	5206062509790004	RT 02/01 DESA JIA
173	Sudirman	5206062509760001	RT 15/08 DESA JIA
174	Mansyur	5206060107501388	RT 05/03 DESA JIA
175	Syafrudin	5206060107591256	RT 02/01 DESA JIA
176	A.Malik	5206060710600003	RT 01/01 DESA JIA
177	Ishaka	5206060107561186,	RT 03/02 DESA JIA
178	Sarbini	5206060107521294,	RT 04/02 DESA JIA
179	Fahrin	5206060107811308,	RT 06/03 DESA JIA
180	Syamsudin	5206060703570001,	RT 01/01 DESA JIA
181	Nurdin	5206060107731283	RT 03/02 DESA JIA
182	M.Tayeb	5206060402530001,	RT 01/01 DESA JIA
183	Syamsudin	5206060107681228,	RT 05/03 DESA JIA
184	Ahmad Yani	5206060107821507,	RT 05/03 DESA JIA
185	Kusmiadin	5206060107841389,	RT 03/02 DESA JIA

186	Sumanto	5206060504821005,	RT 04/02 DESA JIA
187	H.M.Yasin	5206060107531214	RT 03/02 DESA JIA
188	Muhdar	5206060107661254	RT 01/01 DESA JIA
189	H. Mahmud	5206060107461055	RT 02/01 DESA JIA
190	Ahmad	5206060107621338	RT 02/01 DESA JIA
191	Makruf	5206060802851007	RT 14/07 DESA JIA
192	Sahrul	5206060107781439	RT 02/01 DESA JIA
193	Ahmad Yani	5206060107821507	RT 05/03 DESA JIA
194	Sulhan	5206061006861008	RT 05/03 DESA JIA
195	Anas Fardilan	5206062202761002,	RT 17/01 DESA JIA
196	Arifin	5206060107651250	RT 13/07 DESA JIA
197	H.Tajudin	5206060107521225	RT 02/02 DESA JIA
198	H.Nurdin	5206060107521181	RT 06/03 DESA JIA
199	Ridwan	5206060107701430	RT 04/02 DESA JIA
200	Muhamadin	5206060107660156	RT 01/01 DESA JIA
201	Muhtar	5206060107571453	RT 03/02 DESA JIA
202	Arifudin	5206060308751003	RT 01/01 DESA JIA
203	Farliansyah	5206061303921005	RT 11/06 DESA JIA
204	Muhlis	5272020205820008	RT 01/01 DESA JIA
205	Jaharudin	5206061605810001	RT 10/05 DESA JIA
206	Sahlan	5206062104961007	RT 11/06 DESA JIA
207	Arsyad	5206060507520003	RT 11/06 DESA JIA
208	Syarifuddin	5206060107621357	RT 12/05 DESA JIA

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001